

# **SISTEMATEKA RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN) KECAMATAN LILIRILAU TAHUN 2017**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana kerja (Renja Perubahan) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Lilirilau Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kantor Camat Lilirilau tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kantor Camat Lilirilau selanjutnya disebut Renja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan Renstra Kantor Camat Lilirilau tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kantor Camat Lilirilau. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah di Undang-Undang No.9 Tahun 2015
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
- Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- Peraturan Bupati Soppeng No. 27/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJD ) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja)Perubahan Kantor Camat Lilirilau tahun 2017 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kantor Camat Lilirilau pada tahun 2017.

Renja Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kantor Camat Lilirilau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2017
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Lilirilau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Lilirilau untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2017

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja)Kantor CamatLilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN KANTOR CAMAT LILIRILAU TAHUN 2017 (TRIWULAN II)**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kantor Camat Lilirilau Tahun 2017 dan Capaian Renstra**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kantor Camat Lilirilau Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Camat Lilirilau dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lilirilau**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Lilirilau berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau**

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja KANTOR CAMAT LILIRILAU**

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### **3.3. Program dan Kegiatan,**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN**

### **RENJA PERUBAHAN KANTOR CAMAT LILIRILAU TAHUN**

### **2017**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Lilirilau Tahun 2017 (Triwulan II) dan Capaian Renstra**

Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Lilirilau Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017.

Pada tahun 2017 Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi sampai pada Triwulan II tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

##### **a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya Tunjangan THR yang dibayarkan pada PNS lingkup Kantor Camat Lilirilau yang dainggarkan sebesar Rp3,136,628,356,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,518,582,328,- , - atau 48,41%

##### **b. Belanja Langsung**

*Kecamatan/Kelurahan :*

###### **a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.800.175,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.533.475,- atau 30,51%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.

Out put : Jasa Telpon berupa Pemakaian Jaringan Internet dan Jasa Listrik selama 1 (satu) tahun

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp. 1.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %. Karena Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa STNK kendaraan roda empat dan STNK kendaraan roda dua.

Out put: Jasa STNK Kendaraan Roda empat suadh terbayar namun belum di SPJ kan sedangkan Motor Dinas Jatuh Tempo pada bulan Desember 2017

- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar, Rp. 22.201.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 7.040.000.- atau 31,71 % Kegiatan ini untuk pelayanan kebersihan kantor dan Petugas kebersihan kantor

- Out put: Terpenuhinya kebutuhan Petugas kebersihan dan Jumlah peralatan kebersihan Kantor

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kaantor sebesar Rp4.917.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.954.000 atau 39,73%

Out put: Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp19.140.000,- dengan realisasi Triwulan II sebesar Rp5.800.000,- atau 30,30% kegiatan ini berupa langganan bulanan surat kabar dan majalah selama satu tahun anggaran.

Out put: Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan bahan logistik kantor yang dianggarkan sebesar Rp4.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp480.000,- atau sebesar 11,53% kegiatan ini berupa belanja tabung gas untuk satu tahun anggaran.

Out put: Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dianggarkan sebesar Rp160.088.700,- dan terealisasi sebesar Rp42.214.800,- atau 26,36% berupa keikutsertaan PNS Kantor Camat Lilirilau dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran.

Out put: Persentase rapat rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti

- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 216.334.825,- dengan realisasi Rp. 67.420.375,- atau 31,16%. Kegiatan ini berupa Honor Tim Pengelola keuangan pengadaan ATK, Perangko/Materai, Barang Cetakan, Penggandaan Dokumen, makanan dan minuman untuk satu tahun anggaran.

Out put: Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantorn

#### **b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor di anggarkan sebesarRp105.810.000.- dengan realisasi sebesar Rp68.006.000.- atau 64,27% kegiatan ini berupabelanjaPemotong Rumput,Sekat Ruangan , Papan Informasi,Printer,Lemari,Kursi Tunggu,Layar Proyektor dan Sound sistem

Out put: Terpenuhinya kebutuhan perlemgkapan Kantor.

- PengadaanperalatanGedung Kantor di anggarkansebesar Rp. 45.880.500.- dengan realisasi sebesar Rp. 45.880.500.- atau 100% kegiatan ini berupa belanja Laptop,Printer, dan Wibase Kecamatan

Out put: Jenis Peralatan kantor yang diadakan

- Pengadaan Meubelair di anggarkan sebesar Rp. 37.050.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.800.000.- atau 4,86% kegiatan ini berupa belanja Kursi Kerja,Lamari dan Kursi Rapat

Out put: Terpenuhinya Kebutuhan Mebeulair

- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor di anggarkan sebesar Rp. 21.600.000, dengan realisasi sebesar Rp. 6.940.000,- atau 32,13%, kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor

Out Put: Terwujudnya bangunan yang layak fungsi

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp. 112.951.700,- dengan realisasi Rp. 31.737.775,- atau 28,10% kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin dan belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan roda empat dua unit dan kendaraan roda dua tiga unit selama 1 tahun anggaran.

Out put : Tersedianya Kendaraan dinas Operasional yang layak fungsi

- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp8.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.230.000,- atau 39,58%, kegiatan ini berupa pemeliharaan PC10 unit, Notebook4 unit, unit, dan AC 5 unit.

Out put: Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak fungsi

**c) Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

- Bimbingan Teknis dan Peraturan perundang Undangan yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000 dengan Realisasi sebesar Rp6.060.000,- atau 71,29%,kegiatan ini berupa Bimtek yang terdiri dari Perjalanan Dinas Luar daerah dan Biaya Kontribusi bagi PNS yang mengikuti Bimtek

Out put : Meningkatnya Pengetahuan keterampilan PNS

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dianggarkan sebesar Rp47.100.000,- dengan Realisasi Rp13.465.000 atau 28,59%

Out put : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

**d) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

- Bupati Menyapa yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp15.575.000 atau 31,15% Kegiatan ini berupa Tatap muka Pemerintah Kecamatan dengan Masyarakat.selama 2 kali dalam setahun.

Out put : Presentase tatap muka yang dilaksanakan

- Penyuluhan Kamtibmas yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp3.000.000 atau 25% kegiatan ini berupa Penyuluhan Kamtibmas oleh Kapolsek/Danramil Lilirilau

Out Put: Persentase peserta yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas

**e) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)**

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kecamatan yang dianggarkan sebesar Rp21.600.000,- dengan Realisasi Rp.0,- atau % Hal ini disebabkan karena belum terbitnya Peraturan yang mengatur tentang Proses penyelenggaraan perizinan di Kecamatan

Out put: Persentase Surat izin yang diterbitkan



**f) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Masy.Des/Kelurahan**

- Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa dianggarkan sebesar Rp13.851.300 dengan Realisasi Rp,0,- atau 0 %  
Out put : Persentase Pengelolaan dana Desa Yang tepat waktu
- Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu dianggarkan sebesar Rp219.600.000 dengan Realisasi sebesar Rp109,800,000,- atau 50%  
Out put : Persentase Guru mengaji dan Imam Masjid yang dibayar
- Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Desa/Kelurahan dianggarkan sebesar Rp160.800.000,- dengan Realisasi sebesar Rp0 atau 0 %  
Out put : Persentase Ketua RT/RW dan LPMK yang dibayar
- Fasilitasi Kader Posyandu yang dianggarkan sebesar Rp121.500.000,- dengan Realisasi mencapai Rp60.750.000,- atau 50%  
Out put : Persentase Kader Posyandu yang dibayar

**c. Program/Kegiatan yang mengalami Pergeseran/Perubahan Anggaran Tahun 2017**

**Kecamatan :**

**a) Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Belanja Jasa Listrik pada Anggaran Pokok sebesar Rp18.000.000,- pada Anggaran Perubahan Rp,17.000.000
- Belanja Jasa Telpon/Jaringan Internet pada Anggaran Pokok Rp.6.000.000,- dan Anggaran Perubahan Rp.7.000.000
- Belanja STNK pada Anggaran Pokok sebesar Rp.1.110.000,- dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp.1.610.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah pada Anggaran Pokok sebesar Rp73.544.000,- dan pada Anggaran Perubahan ditambah menjadi Rp87.544.000,-
- Belanja Alat Tulis kantor pada Anggaran Pokok sebesar Rp21.170.800,- dan Anggaran Perubahan Rp.23.270.800,-
- Belanja Cetak pada Anggaran Pokok sebesar Rp1.034.300,- dan Anggaran Perubahan Rp.1.534.300,-

**b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Belanja Modal Sekat Ruangan Anggaran Pokok sebesar Rp.10.000.000,- dan Realisasi Rp6.005.000,- sisa Anggaran Rp3.995.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Printer 2 (dua) unit Anggaran Pokok sebesar Rp6.636.000,- dan terealisasi Rp.6.000.000,- Sisa Anggaran Rp636.000,-
- Belanja Modal Layar Proyektor Anggaran Pokok Rp3.500.000,- dengan Realisasi Rp.2.750.000,- dan Sisa Anggaran Rp.750.000,-  
Sehingga ketiga sisa Anggaran diatas sebesar Rp.5.381.000,- dialihkan pada Kegiatan Lain

- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat pada Anggaran Pokok sebesar Rp.10.000.000,- dan pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp.60.500.000,-

**c) Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan**

- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah pada Anggaran Pokok sebesar Rp3.500.000 dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp27.370.000
- Belanja Kepesertaan pada Anggaran Pokok Rp5.000.000 dan Anggaran Perubahan menjadi Rp23.500.000,-

**d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan masyarakat Desa/Kelurahan**

**Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**

- Insentif Imam Masjid pada Anggaran Pokok sebesar Rp50.400.000,- dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp.52.800.000,- hal ini karena adanya usulan penambahan Imam Masjid Kelurahan 1 (satu) orang

**Kelurahan Ujung :**

**a) Pelayanan Adiministrasi Perkantoran**

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Anggaran Pokok sebesar Rp10.995.300 dan pada Anggaran Perubahan berkurang menjadi Rp8.995.000,- Alasan pengurangan Anggaran karena PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah berkurang sehingga Anggaran tersebut dialihkan pada kegiatan lain
- Belanja Alat Tulis Kantor pada Anggaran Pokok sebesar Rp.3.000.000,- pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp5.000.000,- Alasan penambahan Kebutuhan Anggaran Pelayanan khususnya Alat Tulis Kantor masih kurang untuk mencukupi selama 1 (satu) tahun

**b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Belanja Modal Pengadaan Wareless pada Anggaran Pokok sebesar Rp10.650.000,- dan pada Anggaran Perubahan berkurang menjadi Rp5.000.000,- di alihkan pada kegiatan yang baru yaitu Pengadaan Terali Pengaman sebesar Rp5.650.000,- Alasan Penambahan kegiatan yaitu Kebutuhan Pengaman Jendela ,karena kantor kelurahan Ujung adalah Bangunan baru yang belum dilengkapi Terali Jendela

**Kelurahan Cabenge**

**a) Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Belanja Jasa Air pada Anggaran Pokok sebesar Rp444.000,- dan pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp1.000.000

- Belanja Jasa Listrik pada Anggaran Pokok sebesar Rp1.468.500, sedangkan pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp2.000.000,-
- Belanja Jasa TV Kabel pada Anggaran Pokok Rp.240.000,- dan pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp360.000,-  
Alasan Penambahan Anggaran pada kegiatan ini yaitu Ketiga Jasa tersebut Pembayaran tidak mencukupi selama 1 (satu) tahun
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Anggaran Pokok sebesar Rp1.030.000,- dan pada Anggaran Perubahan berkurang menjadi Rp.515.000  
Alasan Pengurangan Karena kebutuhan Jenis Peralatan Kebersihan telah melebihi dari Jumlah yang dibutuhkan
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Anggaran Pokok Rp15.995.300 dan Anggaran Perubahan berkurang menjadi Rp5.995.300,-  
Alasan Perubahan Anggaran karena kurang nya Target PNS yang melaksanakan Perjalanan dinas

**b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Belanja BBM/Gas dan Pelumas pada Anggaran Pokok sebesar Rp5.000.000 dan Pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp8.000.000  
Alasan Perubahan Kebutuhan Biaya Operasional berupa Bahan Bakar tidak mencukupi dari Jumlah Kendaraan Dinas

***Kelurahan Pajalesang***

**a) Pelayanan Perkantoran**

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Anggaran Pokok sebesar Rp19.025.400,- dan pada Anggaran Perubahan berkurang Rp9.025.400  
Alasan Perubahan Anggaran karena kurang nya Target PNS yang melaksanakan Perjalanan dinas

**b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Penambahan Kegiatan berupa Belanja Pemeliharaan Gedung/Halaman dan Taman dianggarkan sebesar Rp7.000.000  
Alasan Perubahan Kondisi Gedung Kantor sudah Layak untuk dipelihara
- Belanja BBM/Gas dan Pelumas pada Anggaran Pokok sebesar Rp5.612.500 dan pada Anggaran Perubahan Rp8.612.500
- Alasan Perubahan Kebutuhan Biaya Operasional berupa Bahan Bakar tidak mencukupi dari Jumlah Kendaraan Dinas

***Kelurahan Macanre***

**a) Pelayanan Perkantoran**

- Belanja Jasa Air pada Anggaran Pokok sebesar Rp480.000,- dan Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp960.000
- Belanja Jasa TV Kabel Anggaran Pokok sebesar Rp240.000,- dan pada Anggaran Perubahan bertambah menjadi Rp360.000  
Alasan Perubahan Biaya Jasa Air, dan TV Kabel tidak mencukupi dari Jumlah Tagihan selama 1 (satu) tahun
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah pada Anggaran Pokok sebesar Rp14.920.000 dan Anggaran Perubahan berkurang menjadi Rp14.440.000  
Alasan Perubahan Anggaran sebagian dialihkan pada Kegiatan Lain yaitu Jasa Air tidak mencukupi

**b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput senilai Rp4.750.000,- dialihkan pada Belanja lain Yaitu Belanja Barang Non Aset tetap (Gorden Peliss) senilai Rp3.910.000,- dan sebagian ditambahkan pada Belanja Modal Pengadaan Printer Rp.3.473.000,- yang pada Anggaran Pokok Rp.1.053.000  
Alasan Perubahan Kondisi Bangunan Kantor yang baru masih perlu dilengkapi
- Belanja Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman dengan Anggaran Rp1.700.000,- dialihkan pada Kegiatan lain  
Alasan Perubahan Karena kondisi Bangunan yang baru belum layak untuk dipelihara

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lilirilau**

Analisis kinerja pelayanan Kantor Camat Lilirilau berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan, dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Camat Lilirilau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Lilirilau tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng.

**a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan**

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik

berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

**b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Perencana di Tingkat SKPD**

Masalah lain yang mempengaruhi yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu, dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

**c. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)**

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng :

**a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Camat Lilirilau**

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai

untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

**b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja**

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

**c. Potensi SDM perencana yang tersedia tidak sebanding dengan bebanpekerjaan yang semakin meningkat.**

Melihat perkembangan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa proses perencanaan semakin diperkuat dalam hal pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu dibutuhkan lembaga perencanaan yang ditunjang oleh perangkat perencanaan yang kuat pula dalam menghadapi tuntutan pembangunan dengan beban yang semakin meningkat. Sementara itu di Kantor Camat Lilirilau masih sangat kurang aparat perencana yang kompeten.

**d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.**

Kondisi organisasi Kantor Camat Lilirilau dilihat dari struktur masih butuh penataan seperti belum masuknya tenaga fungsional di dalam struktur organisasi Kantor Camat Lilirilau. Dengan ketiadaan tenaga fungsional dalam struktur organisasi menyebabkan penempatan tenaga fungsional seperti fungsional perencana, peneliti dan widyaswara belum dilaksanakan. Selain itu, pedoman kerja belum tersedia sehingga kecenderungan terjadi improvisasi dalam mengimplmentasikan program/kerja selama ini.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Kantor Camat Lilirilau menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi
4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Soppeng

5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Ke depan diharapkan Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2017. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Camat Lilirilau Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kantor Camat Lilirilau Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunannya Renja Kantor Camat Lilirilau Kab Soppeng mengacu pada Renstra Kantor Camat Lilirilau Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2017. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kantor Camat Lilirilau Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Lampiran

**Tabel .....**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD**  
**dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan**

SKPD : KANTOR CAMAT LILIRILAU KAB. SOPPENG



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2015, RPJMN ketiga tahun 2017-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2017 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2015. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2015 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2017.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tema RKP tahun 2017 adalah **“Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”**.

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2017 adalah **“Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis Tahun 2017 ”**.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) Kantor Camat Lilirilau Soppeng Tahun 2017. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng yang tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja KANTOR CAMAT LILIRILAU**

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng maka Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Kantor Camat Lilirilau maka tujuan dari renja Kantor Camat Lilirilau pada tahun 2017 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan
2. Meningkatnya peran pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator dan Mediator
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat Desa/Kelurahan

### **3.3. Program dan Kegiatan,**

Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2017 yang dituangkan dalam renja perubahan 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kantor Camat Lilirilau kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )**

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Perizinan

#### **2. Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**

Kegiatan :

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kamtibmas

#### **3. Program Peningkatan kapasitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan**

Kegiatan :

- a. Fasilitasi pendampingan dan pengelolaan Dana ADD di Desa
- b. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji Imam Mesjid dan Penghulu Syara
- c. Fasilitasi Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- d. Fasilitasi Kader Posyandu

#### **4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan:

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor

- c. Pengadaan Meubelair
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

#### **5. Program Pelayanan perkantoran**

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan Layanan kebersihan kantor
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan bahan logistik kantor
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- h. Peningkatan pelayanan perkantoran

#### **6. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

Kegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya
- b. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

#### **7. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Kegiatan :

- a. Profil Kelurahan

Lampiran

**Tabel.....**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**

**Dan Perkiraan Maju Tahun 2018**

**Kabupaten Soppeng**

SKPD : KANTOR CAMAT LILIRILAU

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja Perubahan ) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.. Renja Kantor Camat Lilirilau kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Camat Lilirilau. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Camat Lilirilau kabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kantor Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Cabenge, 30 Agustus 2017

CAMAT LILIRILAU

**ANDI DHAMRAH,S.Sos,M.M**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19700518 199803 1 007